

# **KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM MENINGKATKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PONTIANAK**

Oleh:  
**Yunita Claudia Larasatie**  
NIM. E42011007

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura  
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : [yunitaclaudia@gmail.com](mailto:yunitaclaudia@gmail.com)

## **Abstrak**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi antar instansi dalam meningkatkan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pontianak. Judul skripsi ini diambil berdasarkan permasalahan koordinasi antar instansi dalam meningkatkan program Kota Layak Anak yang masih belum optimal di Kota Pontianak. Kota Pontianak merupakan kota percontohan pertama untuk Program Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Tripathi dan Reddy. Penelitian dilakukan dengan 3 tahap analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi penelitian ini adalah di tiga instansi di wilayah Kota Pontianak yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan yang terakhir Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan. Subjek penelitian ini adalah ketiga instansi yang terlibat dalam koordinasi program Kota Layak Anak di Kota Pontianak. Kesimpulan penelitian ini belum optimalnya koordinasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kontinuitas yang tidak berjalan, tujuan yang tidak jelas, organisasi yang tidak sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang kurang jelas dan komunikasi yang kurang. Oleh karena itu rekomendasinya adalah mengoptimalkan kontinuitas, mensederhanakan organisasi, memperjelas perumusan wewenang dan tanggung jawab serta mengoptimalkan komunikasi.

Kata-kata Kunci : Koordinasi, Anak, Kota Layak Anak

## **COORDINATION BETWEEN ORGANIZATIONS IN IMPROVING KOTA LAYAK ANAK (KLA) PROGRAM IN PONTIANAK**

### **Abstract**

The aim of writing this Essay to acknowledge and analyze about The Coordination between Organizations in Improving Kota Layak Anak (KLA) Program in Pontianak. The title of this Essay is derived based on coordination problem between organizations in improving Kota Layak Anak (KLA) program which has not running optimally in Pontianak. Pontianak is the first pilot city for Kota Layak Anak (KLA) program in West Borneo.

This research used descriptive analysis with qualitative method. The theory that is used in this research is Tripathi and Reddy Theory. The research has been done in three phases which are data reduction, data presentation, and conclusion and verification. The organizations that is used for this research are Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (BPMPAKB), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, and the last is Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan. The subject of this research is the three organizations which involved in coordinating of Kota Layak Anak (KLA) in Pontianak. The conclusion of this research is the coordination of Kota Layak Anak (KLA) program has not running optimally which is caused by several factors, they are lack of continuity, unreasonable purpose, formulation authority, the responsibility that is unclear, complicated organizations and lack of communication. Therefore the recommendation are to optimizing

the continuity, simplify the organization, clarify the authority, be responsible and optimizing the communication skill.

*Keywords : Coordination, Children, Kota Layak Anak.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan pada era seperti sekarang ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, koordinasi mempunyai arti yang penting terutama di antara aparatur pemerintah. Dengan semakin berkembang Kota Pontianak serta meluasnya permasalahan yang dihadapi, Pemerintah Kota Pontianak membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Pontianak dengan fungsi masing-masing di tiap bidang. Dengan adanya wewenang dan tanggung jawab berarti telah diketahui tanggung jawab masing-masing instansi Pemerintah dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. Program Pemerintah akan selalu berkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya, salah satunya adalah pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA).

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana

secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten atau kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor : SK-49/MEN.PP/IV/2007 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak, Kota Pontianak merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Kabupaten dan Kota yang ikut bergabung untuk mendukung berkembangnya Kota Layak Anak di Indonesia. Kategori Kota Layak Anak ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu:

1. Pratama,
2. Madya,

3. Nindya,
4. Utama,
5. Kota Layak Anak.

Dari pemberitaan di Website resmi KLA memaparkan Kota Pontianak telah sampai kepada tahapan pertama Pratama pada tahun 2011. Tahapan kedua Pratama pada tahun 2012 dan mencapai tahapan Madya pada tahun 2013. (*www.KLA.or.id*)

Program Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu program yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari SKPD di Kota Pontianak. Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretaris Daerah Kota Pontianak merupakan bagian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak merupakan sekretaris merupakan koordinator pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Pontianak ini. Dalam pelaksanaan Kota Layak Anak, BPMPAKB tentu mengalami kendala-kendala, salah satunya dalam koordinasi dengan SKPD lain untuk mewujudkan Kota Layak Anak, koordinasi antar SKPD dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi setiap kategori sebuah Kota Layak Anak. Menurut Keputusan Walikota Pontianak Nomor 580 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan KLA Kota Pontianak pada tanggal 11 November 2008. Tim Pelaksana Pengembangan KLA ini merupakan organisasi yang dibentuk dari

berbagai macam instansi, dan dengan pembagian tugas wewenang dan tanggungjawab masing-masing anggota organisasi tersebut sesuai dengan tupoksi instansi masing-masing.

Dalam mewujudkan Kota Layak Anak, Kota Pontianak harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta kebijakan yang mendukung tetapi dalam pelaksanaan KLA mengalami kendala dalam masalah koordinasi. Pada pra survey yang peneliti lakukan Kepala BPMPAKB mengungkapkan jarang mengadakan rapat-rapat khusus yang membahas mengenai KLA, ditambahkan masyarakat berpendapat bahwa masih kurangnya fasilitas seperti taman bermain khusus untuk anak-anak yang menjadi salah satu faktor penyebab belum dapat terwujudnya KLA di Pemerintah Kota Pontianak. Kota Pontianak saat ini masih belum mampu memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan. Dalam hal ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) perlu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum namun dikarenakan ada nomenklatur tahun 2013, akhirnya merupakan wewenang dan tanggungjawab Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak yang ditetapkan dengan dasar Keputusan Walikota Nomor 42/BPMPAKB/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA Kota Pontianak untuk

pengadaan sarana dan prasarana seperti taman bermain tersebut. Sejumlah masalah yang muncul antara lain masyarakat juga mengeluhkan masih dijumpai banyak anak-anak usia sekolah mengamen di jalanan kemudian berkeliaran di perempatan jalan, berjualan koran maupun meminta-minta di Kota Pontianak. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan koordinasi yang baik juga dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dalam upaya mengurangi anak-anak terlantar di jalanan.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut menjadi sebuah penelitian. Dari pemaparan terkait dapat dilihat dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kota Pontianak masih belum optimal karena masih kurang baiknya koordinasi dari setiap instansi tersebut. Untuk itu peneliti perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Koordinasi antar instansi dalam meningkatkan program Kota Layak Anak di Kota Pontianak.”

## **2. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini akan mengetahui proses koordinasi dalam meningkatkan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pontianak. Dari latar belakang yang ada terdapat masalah yaitu dalam proses koordinasi yang tidak optimal.

## **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis uraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya yaitu: “Bagaimana koordinasi antara BPMPAKB Kota Pontianak, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak dalam meningkatkan Program Kota Layak Anak di Kota Pontianak

## **4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan permasalahan, maka tujuan penulis adalah untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi antara BPMPAKB Kota Pontianak, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak dalam meningkatkan Program Kota Layak Anak di Kota Pontianak.

## **5. Manfaat Penelitian**

### **a) Manfaat Praktis**

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi dimana penelitian ini dilakukan. Serta dapat memberi sumbangan pikiran atau gagasan agar tercipta koordinasi yang baik di institusi terkait, program Kota Layak Anak berjalan dengan baik dan untuk anak-anak di masa yang akan datang.

## b) Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk mendalami ilmu dalam pengkajian khususnya ilmu manajemen pemerintahan. Selain itu penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberi kontribusi dibidang studi tentang koordinasi. Manfaat lain dari penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi penelitian baru atau penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

## B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

### 1. Kerangka Teori

Dalam berbagai literatur, pengertian tentang koordinasi sangat beragam. Pendapat Sondang P. Siagian, M.P.A., Ph.D. mengatakan koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin. Syarat-syarat koordinasi menurut Tripathi dan Reddy (Moekijat 2006:39) ada 9 (sembilan) syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yakni:

### 1. Hubungan langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung di antara orang-orang yang bertanggungjawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham, apabila ada dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

### 2. Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijakan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana itu sendiri harus ada konsultasi bersama. Dengan cara demikian tugas penyesuaian dan penyatuan dalam proses pelaksanaan rencana menjadi lebih mudah.

### 3. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Oleh karena koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama organisasi melaksanakan fungsinya.

### 4. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan yang baik intern

maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi jangan sampai kaku. Koordinasi ini akan meredakan masalah-masalah apabila timbul koordinasi yang baik sekali akan mengetahui secara dini dan mencegah kejadiannya.

5. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu organisasi. Pimpinan harus diberitahu tentang tujuan organisasi dan dimintasi agar bekerja untuk tujuan bersama perusahaan. Suatu tujuan yang jelas dan diberitahukan secara efektif kepada kepala-kepala bagian dimaksudkan untuk menghasilkan keselarasan tindakan.

6. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi di antara kepala-kepala bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan fungsi yang erat berhubungan dapat ditempatkan di bawah beban seseorang pejabat pimpinan apabila hal ini akan mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi.

7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Selanjutnya, wewenang yang jelas membantu pimpinan dalam memelihara orang-orang bawahan bertanggung jawab atas pelanggaran pembatasan-pembatasan.

8. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. terjadinya saling-tukar informasi secara terus-menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, program-program untuk waktu yang akan datang. Terjadinya komunikasi yang efektif tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan organisasi dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan keseluruhan staf dapat diarahkan secara harmonis menuju ke pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

9. Kepemimpinan dan supervise yang efektif  
Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervise. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Pemimpin yang efektif membuat kepercayaan terhadap orang-orang bawahan dan memelihara juga semangat kerja mereka. Sesungguhnya, kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada metode lain yang menggantikannya.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Artinya penulis mencoba menggambarkan fakta yang terjadi sekarang sebagai realitas natural tanpa adanya fenomena yang dibuat-buat yaitu mendeskripsikan koordinasi antara BPMPAKB Kota Pontianak, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak dalam meningkatkan Program Kota Layak Anak di Kota Pontianak.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer dengan

menggunakan panduan wawancara dan bantuan alat dokumentasi berupa alat perekam serta teknik observasi yaitu penulis melihat langsung kenyataan di BPMPAKB Kota Pontianak, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak yang berhubungan dengan penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara merekam seluruh aktivitas penulis dalam rangka pengumpulan data.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Menurut Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:183), ada tiga komponen pokok dalam menganalisis data dengan model interaktif, yakni : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kontinuitas

Pengembangan Kota Layak Anak terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi. Dengan adanya tahapan-tahapan program KLA tersebut, maka koordinasi yang dilakukan harus merupakan sebuah proses yang berjalan

terus-menerus dalam arti lain proses yang sifatnya berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan program KLA. Hal ini tidak lepas dengan fungsi-fungsi yang harus dijalankan masing-masing tim. Apabila tim menjalankan fungsinya dengan baik, maka koordinasi yang dilakukan akan berkesinambungan. Tujuan pelaksanaan kebijakan pemekaran dan prosedur atau tahapan pelaksanaan kebijakan pemekaran kelurahan akcaya. Koordinasi dalam pelaksanaan program KLA sudah berjalan cukup baik pada instansi tertentu namun masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahapan awal sampai akhir tidak semua tim mengetahui perkembangan KLA dan masih belum merasakan kontinuitas dalam koordinasi pelaksanaan KLA. BPMPAKB sebagai pengkoordinator selalu memberitahukan hasil penilai setiap tahunnya tetapi tidak memberitahukan kepada semua tim yang ada.

## **2. Tujuan yang jelas**

Dengan pengarahan kepada seluruh anggota organisasi mengenai tujuan organisasi dengan jelas maka akan menghasilkan keselarasan tindakan yang bermanfaat positif bagi koordinasi yang ada sehingga dapat meningkatkan koordinasi yang ada di antar tim pelaksana KLA. Tetapi yang terjadi selama peneliti melakukan penelitian di lapangan, tujuan KLA masih belum dipahami secara

menyeluruh oleh anggota tim pelaksana KLA. Sebagai koordinator dari program KLA, BPMPAKB perlu memperjelas tujuan yang ingin dicapai melalui rapat-rapat atau pertemuan khusus bahkan sosialisasi yang membahas tentang KLA sehingga nantinya diharapkan masing-masing anggota memahami tujuan KLA dan dapat menerapkan program KLA dengan baik. Dikarenakan tidak semua tim yang tergabung di dalam tim pelaksanaan KLA mengetahui tujuan KLA yang jelas hal ini membuat koordinasi antar tim pelaksana KLA dalam meningkatkan Program KLA belum berjalan secara optimal.

## **3. Organisasi yang sederhana**

Dalam Kota Layak Anak ini pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur anggota-anggota tim yang ada melalui penerapan pembagian kerja, pendelegasian wewenang dan koordinasi dalam bentuk struktur organisasi seperti yang tertera di Keputusan Walikota Pontianak Nomor 580 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Pontianak menyebabkan koordinasi menjadi sulit dikarenakan banyaknya instansi terkait. Penyampaian informasi yang tidak menyeluruh juga menyebabkan koordinasi menjadi rumit dan panyampain tujuan program tidak terjalin secara

optimal. Sebagai tim koordinator BPMPAKB juga mengeluhkan karena banyaknya instansi yang terkait dalam program KLA dan hal ini menyimpulkan program KLA memerlukan organisasi yang sederhana dalam penerapannya

#### **4. Perumusan wewenang dan tanggung jawab**

Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas berhubungan erat dengan struktur organisasi, hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi harus menggambarkan penjabaran dari fungsi-fungsi tugas pokoknya. Oleh karena itu diperlukan penjabaran wewenang yang mengatur koordinasi antar tim yang melaksanakan program KLA agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang. Wewenang masing-masing unit atau bagian tidaklah sama oleh karena itu wewenang dan tanggung jawab yang jelas mengurangi pertentangan atau perbedaan paham dari pihak lain membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga apabila dengan mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya yang jelas akan memudahkan untuk menyatupadukan atau menyelaraskan tindakan dari masing-masing pihak yang berlainan paham atau pendapat. Selain itu juga terjadi inisiatif yang baik dari salah satu instansi untuk melakukan inovasi dalam pengembangan program KLA sehingga menjalin

koordinasi dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenang dari masing-masing instansi.

#### **5. Komunikasi yang efektif**

Koordinasi dalam sebuah program yang direncanakan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari komunikasi. Tanpa komunikasi yang diatur secara baik, maka tidak mungkin koordinasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. komunikasi yang terjalin antara BPMPAKB sebagai pengkoordinator dan tim-tim yang terkait. Menimbang bahwa instansi-instansi yang terlibat didalam tim juga memiliki tugas masing-masing jadi perlunya peran aktif BPMPAKB sebagai *leading sector* untuk mensosialisasikan program Kota Layak Anak kepada tim-tim terkait agar lebih terjalin komunikasi yang baik. Dapat disimpulkan bahwa benar adanya jika dalam suatu proses pelaksanaan program yang tidak melakukan komunikasi dengan baik antara koordinator dengan tim *target group* atau tim pelaksana program yang terlibat, maka tidak akan dapat membuat program KLA tersebut berjalan dengan baik.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **a) Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan masalah di atas penulis menyimpulkan mengenai

koordinasi antar instansi dalam meningkatkan program Kota Layak Anak di Kota Pontianak yaitu:

#### 1. Kontinuitas

Bahwa kontinuitas koordinasi dalam pelaksanaan program KLA belum berjalan secara optimal dikarenakan dari setiap tahapan BPMPAKB sebagai koordinator tidak memberitahu secara menyeluruh kepada semua tim pelaksana KLA sehingga masih ada anggota tim yang tidak mengetahui perkembangan tahapan KLA.

#### 2. Tujuan Yang Jelas

Koordinasi dapat diterapkan dengan baik apabila seluruh anggota organisasi mengetahui dengan jelas tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Pemahaman yang baik akan tujuan membuat anggota organisasi menyadari pentingnya koordinasi sehingga koordinasi dapat berjalan secara efektif. Hasil penelitian yang telah dilakukan masih ada anggota dari tim yang belum memahami tujuan KLA.

#### 3. Organisasi yang sederhana

Organisasi yang sederhana merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan koordinasi. Hasil penelitian mengungkapkan organisasi yang daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit. Dikarenakan terlalu banyak instansi yang terkait

menyebabkan koordinasi menjadi lebih rumit.

#### 4. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Bahwa anggota tim pelaksana KLA belum menerapkan dengan baik tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga faktor perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas menjadi faktor yang mempengaruhi suatu koordinasi yang efektif. Anggota tim pelaksanaan KLA hanya mengetahui secara umum wewenang dan tanggungjawab mereka tanpa ingin mengetahui lebih lanjut dikarenakan sikap acuh tak acuh juga dan masih memikirkan masih ada tugas pokok yang lebih penting dari program KLA. Anggota tim pelaksanaan KLA hanya mengetahui secara umum wewenang dan tanggungjawab mereka tanpa ingin mengetahui lebih lanjut dikarenakan sikap acuh tak acuh juga dan masih memikirkan masih ada tugas pokok yang lebih penting dari program KLA.

#### 5. Komunikasi yang efektif

Bahwa kurangnya komunikasi antara BPMPAKB sebagai koordinator dan tim-tim yang terkait di dalam Program KLA. Menimbang bahwa instansi-instansi yang terlibat didalam tim juga memiliki tugas masing-masing jadi perlunya peran proaktif dari BPMPAKB

sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab.

## b) Saran

Dalam penelitian yang penulis lakukan maka dalam kesempatan ini peneliti ingin memberikan beberapa saran yang mungkin akan berguna dan dapat diperhatikan, berikut saran yang akan peneliti sampaikan:

1. Perlu adanya koordinasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu yang dilewati seperti mengadakan suatu pertemuan khusus secara rutin dengan membahas tentang KLA sehingga baik dari koordinator dan tim pelaksanaan KLA dapat dengan mudah mengetahui perkembangan dari tahapan-tahapan yang sudah dilalui KLA.
2. Tim pengkoordinator sebaiknya mengadakan rapat koordinasi untuk menjelaskan informasi mengenai KLA terlebih dahulu agar seluruh instansi-instansi yang terlibat dengan pelaksanaan program KLA mengetahui dengan jelas apa tujuan program KLA ini.
3. Kebijakan di masing-masing instansi agar pemimpin menunjuk salah satu staf yang bertugas untuk membantu program KLA sehingga pekerjaan bisa lebih terfokus menuju tujuan bersama.
4. Hendaknya ada rapat kerja yang membahas mengenai wewenang dan

fungsi dari instansi terkait agar apatur atau staf yang menangani KLA lebih memahami dan dapat bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang berlaku. Melakukan monitoring terhadap SKPD dalam melaksanakan tugasnya masing-masing apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan harus melakukan evaluasi dalam setiap melakukan kegiatan koordinasi sehingga dapat menemukan kekurangan dan kesalahan yang terjadi.

5. Perlunya diadakan evaluasi rutin (forum koordinasi antar instansi) untuk membahas mengenai program KLA ini.

## E. REFERENSI

### 1. Buku-Buku :

- Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Haji Masagung.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Koordinasi dan Hubungan Kerja*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Manullang. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moekijat. 2006. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta : Rineka Cipta.

Reksohadipradja, Sukanto. 2000. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA.

Sugandha, Dann. 1988. *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta : Intermedia.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University.

Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Syafiee, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.

Tohardi, Ahmad. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura*. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

## 2. Skripsi :

Pradipta Apsari, Candrika, 2011. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Rikky. 2013. *Koordinasi Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusaha Sarang Burung Walet di Kota Singkawang*. Skripsi. Program Studi Ilmu

Pemerintah kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Fajar Satrio, Fuaddianto. 2013. *Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak*. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

## 3. Dokumen :

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kota Pontianak Tahun 2013

## 4. Peraturan Perundang- Undangan :

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor : SK-49/MEN.PP/IV/2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak.

Keputusan Walikota Pontianak Nomor: 580 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anakhugyjug (KLA) Kota Pontianak.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Yunita Claudia Larasatie  
NIM / Periode Lulus : E42011007 / 2015  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : [yunitaclaudia@gmail.com](mailto:yunitaclaudia@gmail.com) / 08985550903

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM MENINGKATKAN PROGRAM KOTA  
LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PONTIANAK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

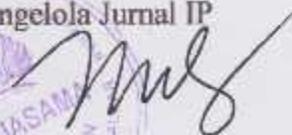
- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal IP

  
Dr. H. Wijaya Kusuma, MA  
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : Agustus 2015

  
(Yunita Claudia Larasatie)